

# Badan Silaturrahi Ulama Madura (BASRA): Dakwah Multi Fungsi

Abdullah Sattar<sup>1</sup>  
martabakbangsatar@yahoo.co.id

**Abstract:** This article examines the proselytizing model of BASRA after the Bridge Surabaya-Madura was built. BASRA as a forum of Muslim preachers has an important role in conducting anticipatory actions towards the effects of industrialization in the aftermath of the establishment of the bridge. This paper explores changes of proselytizing model within BASRA from the so-called cultural ways to structural approaches, and from the normative pattern of Islamic teachings transformation to practical model.

**Keywords:** proselytizing model, forum of Muslim preachers, structural domain, practical politics

**Abstrak:** Artikel ini membahas Model Dakwah Badan Silaturrahi Ulama Madura (BASRA) after paska dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). BASRA sebagai lembaga yang berisikan para da'i mempunyai peran penting dalam melakukan tindakan antisipatif atas efek industrialisasi paska terbangunnya jembatan Suramadu. Tulisan ini mengulas perubahan model dakwah pada BASRA, yakni dari model kultural menuju dakwah struktural; dari pola transformasi ajaran Islam yang normatif menjadi praksis. Argumentasi yang substansial atas mobilitas sebagian para Ulama BASRA ke ranah struktural atau terlibat pada politik praksis adalah demi efektivitas dan sinergitas dakwah.

**Kata Kunci:** model dakwah, BASRA, forum ulama, strategi transformasi, politik praktis

---

<sup>1</sup> Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya

## Pendahuluan

Dalam studi tentang sejarah Syi'ah, dua doktrin telah memainkan peranan penting dalam melahirkan perangkat yurisprudensi politik dan hukum yang saling bertautan.-yaitu keadilan Allah (*al'adl*) dan kepemimpinan individu yang memiliki integritas dan kredibilitas (*al-imamah*) untuk menopang dan memaklumkan pemerintahan yang adil (Sachedina 1991: 21).

Dalam dunia Islam awal yang sangat tertata secara politis, banyak sekali gagasan dan konsepsi tentang tujuan Allah di bumi dan kepemimpinan masyarakat manusia yang tersebar secara bebas. Penaklukan yang cepat terhadap daerah-daerah yang sangat luas dan berlangsungnya proses pengawasan atas penaklukan-penaklukan dan pengaturan urusan-urusan di daerah taklukan itu, menuntut tidak hanya adanya kepemimpinan yang kuat dan piawai, tetapi juga adanya penciptaan suatu sistem yang dapat memberikan stabilitas dan kemakmuran. Yang sangat penting bagi aktivitas sosial, politis, dan ekonomi ini adalah janji Islam (al-Qur;an dan Sunnah Nabi saw): penciptaan suatu tatanan masyarakat yang adil yang merupakan manifestasi kehendak Allah Swt.

Janji tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Allah itu Mahaadil dan Mahabener. Keadilan Allah menuntut agar Allah melakukan apa yang terbaik bagi manusia, dan kebenaran Allah melahirkan keyakinan bahwa janji Allah akan terpenuhi. Bukti bahwa Allah melakukan apa yang telah dijanjikan diberikan dengan mengutus Nabi untuk memandu manusia kearah penciptaan tatanan dunia Islam. Hubungan antara bimbingan Ilahi dengan penciptaan tatanan dunia Islam, sebagai konsekwensinya, menandai interdependensi yang tak dapat diganggugugat antara yang religious dan yang politis dalam Islam. Hasilnya, dalam dunia intelektual, adalah penciptaan yurisprudensi politis (*al-fiqh al-siyasi*) yang dipandu oleh prinsip-prinsip doktrin keagamaan (*al-I'tiqadat*), sekalipun doktrin itu tidak dirumuskan atau dijelaskan dengan memadai, paling tidak dalam tahap-tahap awalnya (Sachedina 1991: 21).

Ketika Nabi Muhammad saw masih hidup, tatanan dunia Islam di bawah kendali beliau. Segala persoalan masyarakat diselesaikan

langsung oleh beliau, baik melali tutur kata, perbuatan atau ketetapan. Tidak ada pertentangan yang signifikan di masyarakat dalam masalah norma dan hukum, meski perbedaan tentu tetap ada. Tidak adanya konflik horizontal di dalam masyarakat terkait dengan tatanan kehidupan, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi kenabian Muhammad saw berjalan efektif dan berdayaguna.

Sayangnya, sepeninggal beliau mulai timbul konflik di tengah-tengah umat Islam, bahkan nyaris *chaos*. Oleh karena itu, harus ada sosok pengganti Nabi yang dapat memikul tugas kenabian untuk membimbing umat, mencerahkan bahkan menyelesaikan problematika kehidupan umat. Dan sosok yang dimaksud adalah ulama, dan ulama pun mempunyai posisi yang istimewa. Meski kedudukan ulama tidak sama dengan Nabi, akan tetapi tugas yang diembannya tidak kalah beratnya, sebagaimana yang dipikul Nabi yaitu bagaimana membuat tatanan dunia Islam yang adil dan bermartabat.

Ada empat tugas utama ulama sesuai fungsi kenabian dan mengembangkan Kitab suci yaitu; pertama menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya sesuai dengan perintah, Wahai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-mu (Q.S. 5 : 67) Kedua, menjelaskan ajaran-ajaran Islam berdasarkan ayat, Dan Kami turunkan al-Kitab kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia (Q.S. 16 : 44). Ketiga, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat berdasarkan ayat, Dan Allah turunkan bersama mereka al-Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperse-lisihkan manusia (Q.S. 2 : 213). Dan keempat, memberikan contoh pengamalan sesuai dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan Bukhari bahwa perilaku Nabi aw adalah praktik al-Qur'an (Shihab 2007:385).

Ulama harus menyampaikan apa yang tersirat dan tersurat di dalam al-Qur'an sebagai suatu kewajiban, di samping harus mampu memberikan penjelasan dan pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, berdasarkan al-Qur'an, Meskipun al-Qur'an tidak memberikan konsep yang menguasai prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang digariskannya, baik dalam bidang politik, ekonomi social maupun budaya (Shihab 2007:385).

Dalam hal ini, ulama tidak dapat berpegang hanya pada satu penafsiran ayat al-Qur'an saja, tetapi ia harus dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Hal ini bukan berarti bahwa al-Qur'an mengakui begitu saja perkembangan masyarakat, tetapi-sesuai fungsinya sebagai petunjuk ia harus dapat mendorong dan mengakomodir perkembangan-perkembangan positif yang dilakukan potensi masyarakat. Ulama harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan yang mengarahkan perkembangan budaya modern atau teknologi yang canggih sekalipun.

Dengan demikian, tidak boleh tidak, seorang ulama harus menjadi pemimpin masyarakat, walaupun -tentu saja- tidak dapat menyamai prestasi Nabi dalam memimpin umat. Hal ini secara nyata telah dijelaskan oleh para kiai yang-secara informal- diakui sebagai pemimpin masyarakatnya. Gelar kiai menunjukkan pengakuan tulus masyarakat atas kepemimpinannya (Shihab 2007: 386).

Ketika perubahan sosial budaya dalam masyarakat kita kian terasa, semakin nyata pula gejala yang menuntut agar peran agama lebih ditingkatkan dan menuntut kehadiran ulama yang dapat diandalkan. Ini terjadi bukan saja karena kepergian satu per satu ulama besar sementara penggantinya belum muncul, tetapi juga karena kualifikasi ulama yang diperlukan tidak sesederhana seperti yang sudah dihasilkan. Inilah agaknya yang memprihatinkan banyak orang, dengan timbulnya apa yang disebut "krisis ulama". Persoalannya sebenarnya lebih banyak menyangkut kualitas, intensitas dan efektivitas lembaga-lembaga pendidikan agama yang dimiliki (Shihab 2007:387).

Seorang ulama dituntut untuk dapat memahami perkembangan masyarakatnya. Dalam dunia modern sekarang ini, seorang ulama tidak dapat hanya sekedar mendalami ilmu-ilmu fiqh, tafsir atau hadits saja, apalagi jika pengetahuannya hanya bersifat hapalan yang statis. Untuk menjawab tantangan dan problem zaman kini dan akan datang, diperlukan penguasaan ilmu-ilmu tentang Islam yang lengkap dan dinamis, di samping perangkat ilmu dan wawasan yang dapat dipakai untuk memahami perkembangan masyarakat. Dengan demikian, ulama selalu dapat memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat

diterima, tidak tertinggal atau terjerat karena pemahaman agama yang statis dan wawasan yang sempit.<sup>2</sup>

Madura adalah salah satu pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bukan sekedar beragama Islam formal, melainkan agama yang mentradisi, artinya agama menjadi penuntun dalam berperilaku sehari-hari, Sebagai bagian dari dunia, Madura tentu tidak akan lepas dari pengaruh global, apalagi setelah jembatan Suramadu (jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Madura) dibangun. Sempat muncul kekhawatiran dari beberapa ulama Madura, bahwa Madura akan berubah drastis manakala pembangunan jembatan Suramadu sudah selesai dan diikuti oleh terjadinya industrialisasi di Madura.

---

<sup>2</sup> “Ain Najaf dalam *Qiyadatul ‘Ulama wal Ummah*, menyebutkan enam tugas ulama: 1. Tugas intelektual (al’amal al-fikriy): mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Mengembangkan pemikiran dengan mendirikan majelis-majelis ilmu; menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia. 2, Tugas bimbingan keagamaan: menjadi rujukan (marja’) dalam menjelaskan halal dan haram. Mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam. 3, Tugas komunikasi dengan umat (al-ittishal bil ummah): dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh terpisah dan membentuk kelas elit. 4, Tugas menegakkan syiar Islam: memelihara, melestarikan dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam. Ini dapat dilakukannya dengan membangun masjid, meramaikannya, dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya. 5, Tugas mempertahankan hak-hak umat: tampil membela kepentingan umat jika hak-hak mereka dirampas. Berjuang “meringankan penderitaan mereka dan melepaskan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka” (al-A’raf (7): 157). 6, Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin: ulama adalah mujahidin yang siap menghadapi lawan-lawan Islam bukan saja dengan pena dan lidah, tetapi juga dengan tangan dan dadanya. Lihat Murtadha Muthahhari (2007: 18-19). Lihat pula Mohammad Sobary (2007: 85-86). Menurut Sobary, ulama dan kiai adalah sama-sama pemuka agama karena memiliki pengetahuan agama Islam. Bedanya, kiai memiliki pesantren sedangkan ulama tidak. Ulama dan kiai memperoleh posisi prestisius dalam masyarakat, bukan karena memiliki wewenang formal, melainkan karena kelebihan intelektual mereka. Baik ulama maupun kiai biasanya dianggap sebagai pemimpin moral, keagamaan dan sosial. Menurut Hirokoshi, tugas ulama adalah untuk mengajarkan doktrin agama, yaitu seperangkat nilai untuk membimbing tingkah laku moral anggota-anggota masyarakat.

## **Religiusitas dan Etos Kerja Orang Madura**

Penduduk Madura selama ini dikenal sebagai masyarakat yang cukup kuat memegang tradisi. Hingga saat ini berbagai macam tradisi di bidang keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi hidup dan berkembang secara dinamis di Pulau Madura. Berbagai tradisi tersebut diwarisi oleh masyarakat Madura dari nenek moyang mereka secara turun temurun sepanjang sejarah. Secara historis, tradisi masyarakat Madura sebenarnya tidak berbeda jauh dari tradisi masyarakat Jawa, yakni masih memiliki pertalian dengan nilai-nilai yang pernah dianut masyarakat pada masa kerajaan Hindu dan Islam. Sejarah mencatat bahwa Pulau Madura pernah berada di bawah pengaruh Kerajaan Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, dan Mataram. Hanya saja, pada masyarakat Madura peralihan dari era Hindu ke era Islam lebih tegas dibanding pada umumnya masyarakat Jawa Pedalaman, sehingga nilai-nilai ajaran Islam tampak lebih kental mewarnai tradisi-tradisi yang hidup dan berkembang di Madura hingga saat ini (Mahfudz 2009:1).

Berbagai tradisi yang sarat dengan nilai-nilai ke-Islaman tersebut makin terpupuk seiring dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan di Madura. Lembaga-lembaga pendidikan tradisional mulai dari tingkat keluarga, langgar/surau, hingga pesantren sangat menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan pada setiap anggota masyarakat Madura. Hal tersebut menjadi pilihan sadar karena masyarakat Madura percaya bahwa proses internalisasi ajaran agama, yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk etika pergaulan bermasyarakat, akan mendukung terciptanya harmoni sosial. Di sisi lain, pendidikan agama juga sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan spiritualitas setiap individu dalam masyarakat sekaligus menjadi faktor utama pembentuk karakter atau jati diri masyarakat Madura yang religius (Mahfudz 2009:1).

Karakter masyarakat Madura, selain dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, juga dipengaruhi oleh faktor alam. Banyak orang menghubungkan karakter masyarakat Madura yang santun dan hangat tapi juga bisa tegas dan keras, bersahaja, gigih dan ulet, dengan struktur tanah dan kondisi alam di Madura. Tanah Madura

yang kurang subur memang tidak begitu menguntungkan bagi warga masyarakat yang membuka lahan pertanian dan peternakan. Oleh sebab itu, masyarakat petani Madura dipaksa oleh alam untuk senantiasa bekerja keras dengan kreativitas yang tinggi untuk mempertahankan survivalitas mereka. Kreativitas masyarakat Madura sejak zaman dahulu telah terbukti dapat menghasilkan alternatif-alternatif yang dapat menggerakkan perekonomian di tengah keterbatasan alam, seperti pertanian lahan kering dengan makanan pokok yang disesuaikan dan peternakan sistem paron (*ngowan*) yang rumit dan tipikal. Kegigihan dalam bekerja keras juga dimiliki oleh masyarakat Madura yang memilih bidang pekerjaan lain di luar pertanian. Sebut saja, misalnya, para nelayan Madura yang terkenal dengan falsafahnya: *asapo' angen abantal omba'* (berselimut angin berbantal ombak) yang menunjukkan bahwa mereka pantang berleha-leha dan berputus asa dalam berusaha. Begitu juga dengan para pedagang dan perantaunya yang sudah sangat dikenal keuletan dan kreativitasnya di berbagai pelosok bumi Nusantara (Mahfudz 2009).

Keuletan orang Madura secara alamiah muncul disebabkan alam Madura yang kering dan tandus. Karena alam Madura yang kering, orang Madura lebih akrab dengan *tegal*, ladang, alias budi daya lahan kering, ketimbang budi daya lahan basah seperti sawah. Untuk mengelola ladang, tak diperlukan manajemen yang rumit, dan tak banyak tenaga kerja. Cukup dikerjakan keluarga. Konsekuensinya, ia menuntut etos kerja tinggi. Muncullah budaya *tegal*, yang punya karakteristik individu mandiri (*GATRA* 27 Oktober 2000). Tak mengherankan, etnis Madura dikenal sebagai pekerja keras, tak hanya di Pulau Madura, melainkan juga ketika mereka bermukim di tempat lain. Bahkan adagium etos kerja orang Madura adalah *kar kar-kar nyople'*, (mengais-ngais rizki, kalau ada diambil walau sedikit).

Meskipun masyarakat Madura memiliki etos kerja yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi mereka tidak dapat berkembang dengan pesat. Selain disebabkan oleh karena kreativitas yang mereka ciptakan masih bersifat tradisional, kondisi geografis Pulau Madura juga kurang mendukung. Madura, sebagai bagian dari Jawa Timur dipisahkan oleh lautan sehingga mengesankan bahwa alam memang

mengisolasinya dari hingar bingar yang terjadi di Pulau Jawa. Akibatnya, sekian puluh tahun masyarakat Madura termarginalkan dalam pembangunan yang pada gilirannya berdampak domino pada timbulnya prasangka sosial terhadap orang Madura (Mahfudz 2009:2).

Keterbelakangan pembangunan memang kerap kali berkelindan dengan keterbelakangan di bidang ekonomi dalam suatu wilayah. Pembangunan biasanya akan bergerak maju pada wilayah-wilayah yang secara ekonomi memiliki potensi untuk maju sehingga antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat saling mendorong. Logika simbiosis mutualisme antara pembangunan dan potensi ekonomi tersebut pada akhirnya sampai juga ke Madura setelah ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kawasan pantai Pulau Madura sebenarnya sangat kaya akan minyak dan gas. Pada tahun 1990 Pemerintah Pusat mencanangkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dan 19 tahun kemudian jembatan itu pun mewujud nyata (Mahfudz 2009:2).

### **Sejarah Kelahiran Badan Silaturrahi Ulama Madura (BASRA)**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tugas ulama adalah memberikan solusi terkait persoalan kehidupan yang dihadapi umatnya. Ketika masyarakat Madura resah dengan rencana pembangunan jembatan Suramadu dan industrialisasi di Madura yang dikuatirkan akan berdampak tergerusnya nilai-nilai religious dan moral dari kehidupan mereka, para ulama Madura sering mengadakan silaturrahim di antara mereka. Memang, silaturrahin mereka tidak semata-mata persoalan jembatan Suramadu, namun jembatan Suramadu dan rencana industrialisasi di Madura menjadi magnet tersendiri.

Kiai-kiai sepuh Madura seperti kiai Abdulah Cholil Bangkalan, kiai Tidjani Djauhari Sumenep, kiai Muhammad Rofii Baidlowi Pamekasan, kiai Dhafir Syah Sampang sering bertemu dan bersilaturrahmi. Dari pertemuan ini tercetuslah ide untuk membentuk forum silaturrahmi antara ulama yang diberi nama Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA) pada tahun 1991.

Tujuan didirikannya BASRA bukan semata-mata karena jembatan Suramadu akan dibangun, namun karena banyak faktor di anta-



ranya; pertama, memupuk ukhuwah di kalangan pesantren, terutama pesantren yang diasuh kiai-kiai NU Nahdlatul Ulama) dan SI (Syarikat Islam). Sebagaimana dimaklumi bahwa di Madura terdapat banyak pondok pesantren, baik yang besar (jumlah santri di atas dua ribu orang), menengah (jumlah santri seribu sampai dua ribu orang), maupun kecil (jumlah santri kurang dari seribu orang). Jumlah pondok yang banyak, memang merupakan modal sosial yang amat berharga, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pemicu konflik horizontal, sekurang-kurangnya terjadi persaingan yang tidak sehat di antara sesama pengelola pondok pesantren. Oleh karena itu, memupuk ukhuwah di kalangan pondok pesantren adalah sebuah keniscayaan. Di samping ajang *sharing* dan berbagi pengalaman

Kedua, menyikapi kurikulum pesantren yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena geneologi keilmuan kiai di Madura bercabang-cabang. Sebagian kiai *ngangsu kaweruh* kepada Mbah Cholil Bangkalan, terutama kiai-kiai di Bangkalan. Sebagian menimba ilmu kepada Kiai As'ad di Asembagus Situbondo, sebagian mondok di pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, dan lain-lain. Perbedaan geneologi keilmuan ini menyebabkan perbedaan kurikulum dan penggunaan kitab-kitab kuning di pesantren masing-masing. Dan tentu saja dibutuhkan komunikasi yang intens di antara kiai sekaligus sikap yang dewasa dan toleran.

Di antara tugas ulama sekarang adalah memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang terdapat di dalam kitab kuning untuk segera diantisipasi. Kelemahan-kelemahan itu makin memperkuat pandangan bahwa kitab kuning sama sekali tidaklah suci atau sakral. Kitab kuning bisa dipelajari, dikaji, dikoreksi, digugat, dan direkonstruksi terkait dengan kelemahan-kelemahannya (Qomar tt.:128).

Apabila dibandingkan dengan perkembangan ilmu-ilmu kealaman, sosial, dan budaya, keilmuan kitab kuning agak terlambat berkembang, kalau tidak mau disebut mandeg. Padahal, secara umum, keilmuan kitab kuning dinilai sangat tinggi, dalil-dalil atau dasar-dasar materinya sangat lengkap, luwes dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Kitab kuning yang beredar di pesantren sebagian besar berasal

dari kelompok ilmu-ilmu syari'ah terutama ilmu fiqh, dan disusul oleh ilmu nahwu dan sharf (Qomar tt.:129).

Ketiga, menyikapi persoalan sosial kemasyarakatan kekinian. Sebagai wadah perkumpulan ulama yang mempunyai tugas mencerahkan masyarakat, maka BASRA berusaha menginventarisir berbagai problematika yang dihadapi masyarakat, terutama menyangkut term-term keagamaan dicoba didiskusikan dan dicarikan solusinya agar masyarakat bisa damai dan tentram.<sup>3</sup> Di antara yang dilakukan BASRA adalah melakukan kajian yang mendalam terkait rencana pembangunan jembatan Suramadu dan industrialisasi di Madura.

BASRA adalah paguyuban yang tidak ada pengurusnya; artinya tidak ada ketua maupun anggota. BASRA hanyalah ajang silaturahmi antar kiai atau ulama yang ada di Madura. Keberadaannyapun bersifat informal. Namun demikian, untuk memudahkan koordinasi, di setiap kabupaten diangkat koordinator yang dipilih oleh kiai-kiai atau ulama yang sering bertemu. Sedang untuk kepentingan administrasi (terutama jika ada momen atau event yang berskala nasional) ditunjuk koordinatot pusat dan sekretaris di tingkat Madura.<sup>4</sup>

### **BASRA dan Jembatan Suramadu**

Sering terdengar berita miring bahwa ulama Madura yang tergabung di dalam BASRA menolak pembangunan jembatan Suramadu. Berita ini tak ayal menjadi bulan-bulanan media massa yang mengesankan orang Madura menolak perkembangan. Kalau kiainya saja menolak, apalagi masyarakatnya yang nota bene adalah santri para kiai. Padahal keberadaan jembatan Suramadu sangat strategis untuk membangun Madura ke depan.

Sejatinya ulama Madura yang tergabung di dalam BASRA tidak pernah secara eksplisit menolak pembangunan jembatan Suramadu. BASRA hanya meminta untuk mengkaji dampak positif dan negatifnya. Kalau hanya jembatannya, BASRA tidak pernah keberatan. Namun demikian, dampak ikutan sebagaikses dari pembangunan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan K.H. Nuruddin, Sekretaris BASRA pada 27 April 2012.

<sup>4</sup> Wawancara dengan K.H. Nuruddin, Sekretaris BASRA pada 27 April 2012.

jembatan Suramadu harus diwaspadai, seperti rencana industrialisasi. Jembatan Suramadu tidak mungkin dibangun kalau tidak ada proyek lanjutannya yaitu industrialisasi Madura. Industrialisasi di Madura inilah yang ditolak oleh BASRA.<sup>5</sup>

Penolakan ulama BASRA terhadap rencana industrilisasasi di Madura, bukan tanpa alasan yang rasional, karena mereka telah melakukan kajian yang mendalam, bahkan telah melakukan studi komparasi ke berbagai kawasan industri di Indonesia. Beberapa kawasan industri yang telah dikunjungi adalah Batam, Tangerang, Banten, dan juga kawasan industri Rungkut Surabaya. Semua kawasan yang dikunjungi itu, pada awalnya kental dengan nuansa agama (Islam). Masyarakatnya termasuk Muslim yang taat. Namun ketika industri masuk, banyak pendatang baru yang keberagamaannya tidak jelas, muncul tempat-tempat hiburan, terjadi pergaulan bebas, dan tentu pada gilirannya nilai-nilai sakral agama menjadi tergerus dan termarginalkan. Kerusakan moral nampak di setiap kawasan.<sup>6</sup>

Industrialisasi sebagai bagian dari modernisasi memang berwajah ganda. Di satu sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi dan pendapatan rakyat, namun di sisi lain menimbulkan ekkses tercerabutnya nilai-nilai religi dan moral masyarakat. Idealnya memang industrialisasi berjalan pada rel nya tanpa menyentuh sedikitpun budaya luhur yang ada di masyarakat. Namun fakta berbicara, kawasan-kawasan industri menjadi kota baru yang mengundang daya tarik para pendatang. Sebagai sebuah kota baru, maka keberadaan tempat-tempat hiburan menjadi tidak terelakkan. Bagaimanapun, di tengah kesibukan bekerja manusia pasti merasa jenuh, suntuk, sumpek dan membutuhkan hiburan untuk mengusir rasa bosan itu.

Para ahli teori modernisasi pada umumnya mendasarkan diri pada teori dasar Talcot Parsons tentang Sistem Sosial atau tentang aspek struktur dan peoses sosial dalam masyarakat modern. Di situ, proses modernisasi dilihat sebagai proses segitiga yang sisi-sisinya saling

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan K.H. Nuruddin, Sekretaris BASRA pada 27 April 2012.

<sup>6</sup> Wawancara dengan K.H. Nuruddin, Sekretaris BASRA pada 27 April 2012.

kait mengait; di mana perubahan yang terjadi pada satu sisi, akan ikut mengubah sisi-sisi yang lain; yaitu segi struktural yang menyangkut proses diferensiasi struktur-struktur, kelembagaan, perubahan orientasi sikap individual ke arah yang lebih “progresif” dan segi spesialisasi fungsional dalam proses sosial. Sudah barang tentu, dalam proses modernisasi itu telah dibayangkan bagaimana keadaan akhir (*end-state*) dari proses itu, yaitu suatu sistem sosial seperti yang terdapat dalam masyarakat yang paling modern sekarang ini yang tak lain adalah masyarakat industri maju (Rahardjo 1999: 373-374).

Dewasa ini, harapan formal terhadap agama dan umat beragama terutama adalah “mengatasi dampak dan ekses modernisasi”. Di sini, modernisasi dianggap sebagai keharusan, tanpa banyak dinilai apa hakikatnya dan bagaimana kejadian aktualnya, sedangkan umat beragama diharapkan peranannya sebagai “tukang sapu jalanan”. Malah kepada umat beragama diharapkan untuk dapat “menyesuaikan diri” terhadap proses modernisasi. Di sini, agama ditempatkan pada posisi yang defensif, yaitu harus bisa melayani tujuan dan cara-cara modernisasi. Apabila agama tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak bisa berfungsi efektif dalam mengatasi dampak dan ekses modernisasi, maka agama diperkirakan akan tidak lagi relevan dan harus ditinggalkan (Rahardjo 1999: 373-374).

Tentang industrialisasi di Madura, ulama BASRA juga tidak hitam putih menolak, Namun demikian, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Pertama, industri tidak boleh massif, melainkan secara gradual diatur dan ditata secara cermat. Sumber daya manusia lokal/ pribumi belum siap, Kalau industri dilakukan secara massif dan sporadis di seluruh kawasan Madura, sangat mungkin orang Madura hanya akan menjadi penonton, tidak banyak mengambil peran. Oleh karena itu, harus ada kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (orang Madura) melalui Balai Latihan Kerja, sehingga pada saatnya orang Madura dapat berpartisipasi aktif dalam proyek industrialisasi di Madura, dan bukan menjadi penonton.

Peran ulama dalam hal pembangunan dan khususnya dalam mengatasi kemiskinan, mereka dapat berperan sebagai inisiator atau bisa juga sebagai motivator dan sekaligus menjadi fasilitator, tergantung

kemampuan dan kenyataan lingkungan di daerah masing-masing (Amin 2009: 155). Ulama BASRA berusaha menjembatani kepentingan pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyatnya dan kepentingan rakyat yang ingin menangkap peluang industrialisasi di Madura. Ulama kemudian menyarankan agar pemerintah memperbanyak membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Madura, terutama di pondok-pondok pesantren yang selama ini hanya dikenal sebagai kawah candra dimukanya ilmu-ilmu agama. Di samping itu, pemerintah diharapkan juga banyak membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberi kesempatan masyarakat Madura menyiapkan sumber daya manusia guna menyambut dan menyongsong era industrialisasi Madura nanti.

Di samping itu, semua *stake holders*-terutama pemerintah-diharapkan mewaspadaai dampak lanjutan industrialisasi di Madura. Terjadinya perubahan perilaku keagamaan yang negatif (terutama yang dilakukan para pendatang) harus dipantau secermat mungkin. Pergaulan bebas dan maraknya tempat-tempat hiburan harus diupayakan seminim mungkin, kalau tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Pada sisi lain, gempuran budaya asing yang akan menggerus budaya lokal yang arif dan kaya nilai-nilai religi sangat dikuatirkan. Budaya dan tradisi masyarakat Madura yang kental dengan nuansa keagamaan harus ekstra ketat dikawal. Budaya asing yang permisif dan bebas nilai tentu bertentangan dengan budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai keberagamaan. Belum lagi timbulnya paham individualistik yang secara diametral bertentangan dengan budaya Madura yang guyub dan saling tolong menolong.

Berbagai kekhawatiran di atas yang kemudian mengesankan bahwa orang Madura melalui ulama BASRA menolak industrialisasi di Madura. Padahal sejatinya orang Madura menunggu-nunggu kapan industri akan mulai diberlakukan atau dioperasikan di Madura.

### **Merespon Persoalan umat**

Sebagai pengawal nilai-nilai religi dan moral masyarakat Madura, ulama BASRA sering berhadapan dengan pihak-pihak yang dianggap telah keluar dari jalur mainstream ajaran Islam Madura, setidaknya-

nya telah menyimpang. Pengaduan dan informasi dari masyarakat terkait aktifitas keagamaan yang dianggap menyimpang direspon dan ditindaklanjuti oleh BASRA. Begitu pun jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak selaras dan senafas dengan nilai-nilai Islam, BASRA pun akan melakukan *action*.

Banyak aktivitas BASRA yang dilakukan dalam rangka merespon persoalan umat, di antaranya:

1. Sejumlah ulama Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahi Ulama Pesantren Madura (BASRA) menyatakan bahwa pihaknya kini telah memboikot seluruh produk Amerika Serikat (AS) dan menghimbau kepada umat Islam untuk melakukan tindakan yang sama berkaitan dengan aksi penyerangan militer oleh AS bersama sekutunya ke Afghanistan yang kini kian gencar. Pernyataan itu dicetuskan dalam rapat khusus para ulama BASRA yang digelar di aula Pondok Pesantren Banyuwangi, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Sabtu malam (03/11/01). Hadir dalam pertemuan itu sejumlah coordinator Bassra, antara lain, KH Tidjani Djauhari (Sumenep), K.H. Muhammad Rofii Baidlowi (Pamekasan), dan KH Dhafir Syah (Sampang). Dalam rapat itu, para ulama juga sepakat untuk memulai aksi pemboikotan dari lingkungan internal BASRA dan Pondok Pesantren di Madura, dengan tidak membeli segala produk AS. Aksi tersebut kemudian secara intens akan disosialisasikan kepada masyarakat terutama umat muslim di seluruh nusantara ini (*Republika*: online).
2. Sebanyak 40 ulama yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (BASRA) dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) Pamekasan, Jawa Timur, Senin, membahas kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai melukai umat Islam. "Ulama BASRA dan FMU telah membahas kebijakan presiden yang telah melukai umat Islam," tegas juru bicara BASRA, KH Khalirurrahman, di Pamekasan, Senin.

Menurut dia, selama ini kebijakan presiden seperti memberi dukungan resolusi dewan PBB yang muaranya memberi larangan dalam pengembangan nuklir Iran, tidak sesuai dengan nurani umat Islam. "Ulama Madura menolak kebijakan presiden dalam mendukung resolusi PBB tersebut, dan meminta agar mendukung pengembangan nuklir untuk perdamaian dan disiarkan melalui media yang sama," paparnya. Hal lain yang mendapat perhatian Ulama Madura, yakni bebasnya Redaktur Majalah Play Boy. Padahal, majalah tersebut sudah melukai umat Islam dan tidak disikapi oleh pemerintah. Bahkan yang tidak kalah pentingnya dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yakni saat ini ulama menengarai paham komunisme sudah merajalela dan akan merongrong kemerdekaan RI (*Warta* 16 April 2007).

3. Badan Silaturrahi Ulama Madura (BASRA) Sabtu (14/4) sore, mengadakan pertemuan dengan dua anggota Komisi VIII DPR-RI asal Daerah pemilihan Madura masing-masing Ach Ruba i dan Said Abdullah di ruang pertemuan Islamic Center Pamekasan. Pertemuan itu dalam rangka menyikapi lima rekomendasi Komnas HAM yang dinilai sembarangan, anti agama dan dapat menghancurkan sendi-sendi beragama, khususnya Ummat Islam di Indonesia. Lima rekomendasi itu diantaranya, Menghapus aturan tentang tidak sahnya pernikahan beda agama, menghapus pencantuman agama dalam berbagai dokumen kependudukan, menghapus pasal perlindungan dan penodaan agama, menghapus SKB 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah dan menghapus hak peserta didik dalam mendapatkan pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya. BASRA melalui KH Nuruddin A. Rahman dari Bangkalan bahkan mengusulkan, agar Komnas HAM dibubarkan saja apabila memaksakan rekomendasi tersebut untuk tetap digunakan dalam pengayaan Pansus Kerukunan Ummat Beragama (KBM: online).

Tentu masih banyak aktivitas ulama BASRA yang lain yang memang sejak awal bertugas mengawal nilai-nilai keberagaman Islam Madura. Seperti kasus beredarnya video porno Ariel dan Cut Tari serta Luna Maya, ulama BASRA meminta agar pemerintah segera menangkap pelaku dan memproses secara hukum, dukungan BASRA kepada pemerintah untuk melanjutkan eksplorasi pengeboran seismic yang dilakukan SPE Petro China Madura di daerah setempat, dan lain-lain.

Aktivitas yang dilakukan BASRA adalah pengejawantahan tugas ulama. Sebagaimana yang dikatakan Shadr, bahwa tugas ulama sebagai pewaris Nabi (*waratsatul anbiya'*) adalah menyebarkan ilmu dan kebermanan serta memerangi kebodohan dan kebatilan. Namun ini bukanlah tugas yang mudah. Ini bukanlah tanggung jawab yang dapat dipenuhi dengan berleha-leha, apalagi diiringi dengan gelak tawa. Di sini perlu keseriusan, ketegaran, keikhlasan, keletihan, air mata, dan bahkan darah. Sejarah membuktikan bahwa banyak “manusia berserban dan bertasbih” (ulama) yang menjadi corong kezaliman dan juru bicara hawa nafsu/ Itulah ulama-ulama *su'* (buruk) yang bukannya menjadi *waratsatul anbiya'*, namun menjadi *waratsatul aghniya'* (pewaris orang-orang kaya) (Shahdar 2003:5).

### **Dari Dakwah Kultural ke Struktural**

Ulama yang tergabung dalam BASRA adalah mayoritas ulama NU, bahkan mungkin seluruhnya.<sup>7</sup> Ini dapat dimaklumi karena Madura adalah basis ulama NU dengan pesantrennya. Karena basisnya adalah NU, maka corak dakwah BASRA adalah dakwah kultural. Namun sejak Orde Baru tumbang, euphoria kebebasan merambah semua lini termasuk politik. Partai-partai politik tumbuh bak cendawan di musim hujan. Dan ibarat bunga desa, NU yang memiliki basis massa cukup besar menjadi incaran para petualang politik. NU, melalui ulamanya kemudian diberondong untuk masuk partai politik, setidaknya menjadi pendukung dengan memberikan restu.

---

<sup>7</sup> Sebagian kecil dari kelompok Syarikat Islam (SI). Secara kultur dan *amaliah ubudiyah* tidak ada bedanya antara SI dan NU, keduanya hanya dipisah afiliasi politik.



Para ulama pun -baik personal maupun institusional pesantren-nya- akhirnya menyerah dan tidak sedikit yang masuk partai politik. Dakwah Islam yang awalnya lebih banyak melalui pendekatan kultural dicoba didekati dengan dakwah struktural. Tidak sedikit ulama BASRA yang terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi anggota dewan legislatif, baik pusat maupun daerah. Bahkan tiga kepala Daerah (Bupati) di Madura adalah ulama BASRA. Hanya Bupati Sampang yang bukan, namun Wakil Bupati-nya adalah juga ulama BASRA. Sementara beberapa ketua KPUD juga pernah dijabat ulama BASRA. Di Sampang pernah dijabat K. H. Dhofir Syah, dan di Bangkalan pernah dijabat K.H. Jazuli Nur. Terjunnya ulama ke dalam politik praktis memang menimbulkan kontroversi. Sebagian menolak karena dianggap bukan wilayah ulama atau kiai, sedangkan yang lain justru mendukung guna efektifitas dakwah.

Kini memang banyak kiai NU berpolitik praktis. Tak heran, banyak pihak yang menyesalkannya karena seakan-akan melenceng dari “rel” pengabdian. Namun, melarang kiai berpolitik sama dengan “mengkhianati” lajur historis yang telah terbangun. Pasalnya, sejak masa kerajaan Islam pertama dan masa kolonialisme, kiai sudah “berpolitik”. Bahkan, kelahiran Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 pun atas dasar politik. Mungkin yang menjadi persoalan mutakhir adalah sisi kiai berpolitik praktis yang kental. Hal yang perlu diingat, sebenarnya para kiai pendiri NU sudah membagi peran kiai dalam mengabdikan dan melayani umat agar tidak jumbuh dengan ambisi pribadi. Peran dan fungsi tersebut terbagi lima, yaitu kiai tandur, kiai sumur, kiai catur, kiai tutur dan kiai sembur (Mashuri 2010:94).

Dengan banyaknya ajang politik kontemporer yang melibatkan kiai NU, muncul kesan seakan-akan “tidak ada kiai yang tidak berpolitik”. Generalisasi itu memang bisa dibantah karena ada pula kiai-kiai yang masih bersikap “istiqamah” pada pengabdian-nya. Sayangnya, jika ada kiai berpolitik, selalu saja kiai yang menjadi kambing hitam. Padahal, sebenarnya perilaku politikus sering membuat peran kiai dalam kehidupan mutakhir seakan hanya melulu pada politik praktis.

Seperti sudah disinggung, hal itu karena dalam kearifan kiai-kiai NU zaman dulu peran hakiki kiai sudah terbagi dan dimafhumi seba-

gai kebijakan tradisi. Artinya, ada kiai yang memang “ahli” politik dan birokrat serta ada pula kiai yang “suci” dari politik dan melulu “mengajar mengaji”. Para kiai NU masa lalu begitu sadar bahwa kiai adalah pengayom umat (bahkan untuk non-Muslim), karena NU memang tidak dapat dilepaskan dari peran dan posisi kiai, yang dalam konteks Islam disebut ulama (Mashuri 2010:94).

Terminologi kiai dari bahasa Jawa dan mengarah pada “sesuatu yang dianggap memiliki harkat dan dituakan”. Makna ini diadopsi ke dalam medan semantik ulama, yang berarti orang berilmu dan merupakan pewaris Nabi. Peran kiai menjadi sentral di tubuh NU, mengingat Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama..

Peran politik kiai NU kekinian bias mengacaukan agenda NU sebagai jam’iyah. Dalam hal ini, ada empat indikasi terhadap pokok persoalan yang harus diselesaikan oleh elit NU. Pertama, kondisi internal NU belum mampu mengatur konflik kepentingan yang berbeda di antara para elitnya sebagai sebuah sinergi. Maka, yang muncul adalah celah dan kesenjangan di antara beberapa kelompok dengan kepentingan yang berbeda hingga muncul konflik terbuka.

Kedua, ada indikasi besar bahwa sebenarnya semboyan NU untuk kembali ke khittah 1926 menjadi rumusan ambigu dan bias memicu debat kusir. Maka, tarik ulur NU politik menjadi semakin keras, kadang memunculkan kesalah-pahaman dan konflik.

Ketiga, ada indikasi kuat ikut bermainnya sayap politik baik dari pihak dalam maupun luar NU yang ingin memanfaatkan potensi NU, terutama potensi politiknya terkait dengan jumlah massanya. Maka, kepentingan pihak ini dipaksakan untuk ikut andil dalam agenda panjang NU. Pihak ini sangat mungkin menjadikan NU sebagai batu loncatan untuk menggapai kepentingannya.

Keempat, tekad kembalinya NU ke khittah 1926 harus dimaknai sebagai kembalinya ulama atau kiai di wilayah garapan masing-masing, bukan hanya NU sebagai organisasi. Artinya, ada tugas ulama yang sesuai dengan keahliannya yang selama ini tidak tergarap dan lebih suntuik pada persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan bidangnya.

Kondisi itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi ada kerancuan peran yang sangat riskan terhadap posisi kiai, baik secara kultural

maupun social. Salah satu jalan untuk menjernihkan kembali peran hakiki kiai sebenarnya sudah digagas kiai pendahulu. Peran-peran itu sudah tegali dan terlegetimasi dalam bangunan kultur serta mengarah pada sebuah kearifan budaya tersendiri seperti telah disebutkan, yakni kiai tandur, kiai tutur, kiai sembur, kiai sumur, dan kiai catur. Pembagian ini bukanlah stratifikasi dan berjenjang, melainkan merupakan pembagian peran dalam rangka pengabdian kepada umat sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya.

Politik praktis menjadi wilayah garapan kiai catur, yang berperan dalam permainan kepentingan. Peran ini akan jumbuh manakala kiai sumur, kiai yang berpikir dalam dan bertugas memelihara resonansi jiwa dan rohani umat serta memiliki wawasan dalam dan sumber inspirasi ikut terlibat. Dalam ajang politik praktis belakangan ini, banyak politikus menggoda kiai jenis ini. Hal senada juga terjadi jika peran kiai catur rancu dengan kiai tutur dan kiai ta ndur, aitu kiai yang memang bertugas berdakwah serta menanamkan ajaran keagamaan ke masyarakat serta memangku pesantren untuk menyemaikan dan merawat benih umat (Mashuri 2010:94).

Dalam penelitian yang dilakukan Qasim Zaman tahun 1997, setelah melacak kembali data sejarah awal Islam, sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada bukti yang mengindikasikan adanya pemisahan antara agama dan politik (Negara) atau pemisahan antara ulama dan umaro. Karena itu pemahaman yang memisahkan antara agama dan Negara dan antara ulama dan umaro dalam sejarah awal Islam, secara ilmiah tertolak atau setidaknya-tidaknya patut dipertanyakan (Kamaruzzaman 2001: xiv).

Secara normatif-deduktif maupun empiris induktif, pemikiran maupun praktik menyangkut Negara, pemerintahan maupun politik pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Islam itu sendiri sebagai satu agama sejak awal Islam hingga kini. Realitas sejarah yang menunjukkan konflik atau pemisahan antara ulama (agama) dan umaro (Negara) lebih menggambarkan penyimpangan dari ajaran yang seharusnya. Dengan kata lain, pemisahan tersebut terjadi justru karena penguasa politik otoriter dan korup yang

kemudian mendapat tantangan keras dari ulama yang menginginkan umat tetap berada di jalur ajaran syariah (Kamaruzzaman 2001: xiv).

### Simpulan

Ulama Madura yang tergabung dalam BASRA mencoba untuk mentransformasikan ajaran Islam yang normatif menjadi praktis. Untuk kepentingan ini, model dakwah yang dilakukan variatif, mulai dari dakwah kultural hingga dakwah struktural. Memang tidak sedikit yang menuding bahwa ulama atau kiai telah kehilangan arah orientasi dakwahnya karena terlalu berbau politik praktis (padahal tidak semua ulama yang tergabung di BASRA berpolitik praktis), akan tetapi ada juga yang justru mendukung dengan dalih untuk efektivitas dan sinergitas dakwah.

### Referensi

- Amin, S. M. 2009, *Percik Pemikiran Para Kiai*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- 'BASRA Resmi Boikot Produk AS', *Republika Online*, 4 Nopember 2001. Diakses 22 Juni 2012 dari [http://groups.yahoo.com/group/halal\\_baik\\_enak/message/1148](http://groups.yahoo.com/group/halal_baik_enak/message/1148)
- 'Budaya Ladang Kar-karkar', *GATRA*, 27 Oktober 2000. Diakses pada 27 Maret 2012 dari [http://arsip.gatra.com//2000-10-27/versi\\_cetak.php?id=685](http://arsip.gatra.com//2000-10-27/versi_cetak.php?id=685)
- Kamaruzzaman. 2001, *Relasi Islam dan Negara : Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Indonesia, Tera Jakarta.
- Mashuri. 2010, 'Jika Banyak Kiai Berperan "Kiai Catur"' dalam *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, editor Khamami Zada, A. Fawaid Sjadzali, P.T. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. 2009, *Menyongsong Percepatan Pembangunan Madura*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Bersama Membangun Madura" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bangkalan, Oktober.

- Muthahhari, M. 2007, *Membumikan Kitab Suci: Manusia dan Agama*, penyunting Haidar Baqir, Mizan, Bandung.
- Qomar, M. tt, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Erlangga, Jakarta.
- Rahardjo, M. D. 1999, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cenekiaawan Muslim*, Mizan, Bandung.
- Sachedina, A. A. 1991, *Kepemimpinan Dalam Islam: Perpektif Syi'ah*, penterjemah Ilyas Hasan, Mizan, Bandung.
- Shadr, S.M.B. 2003, *Syahadat Kedua: Ketika Keimanan Sata Tak Cukup...*, penterjemah Muhammad Abdul Qadir Alcaff, Pustaka Zahra, Jakarta.
- Shihab, M.Q. 2007, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT.Mizan Pustaka, cet. XXXI, Bandung.
- Sobary, M. 2007, *Kesalehan Sosial*, LKiS, Yogyakarta.
- 'Ulama Madura Kritisi Kebijakan Presiden terkait Umat Islam', *Warta*, 16 April 2007. Diakses 22 Juni 2012 dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,8737-lang,id-c,warta-t,Ulama+Madura+Kritisi+Kebijakan+Presiden-+terkait+Umat+Islam-.php>